E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5922-5930
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Akurasi Data Kemiskinan Ekstrem Di Kota Bengkulu

Adinda Aulia Nhavilla[1], Bobby Mandala Putra[2], Heru Purnawan[3]

[1,2,3] Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
e-mail: adindanhavilla@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial akibat ketidaksesuaian data kemiskinan ekstrem dengan kondisi faktual masyarakat di Kota Bengkulu, khususnya Kecamatan Kampung Melayu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akurasi data P3KE/DTSEN dalam mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan Teori Kualitas Data Richard Y. Wang dan Diane M. Strong (1996) yang mencakup dimensi intrinsik, kontekstual, representasional, dan aksesibilitas. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri dari operator Dinas Sosial, Bappeda, kelurahan, ketua RT, dan warga penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi data belum sepenuhnya optimal, ditandai adanya inclusion error, keterlambatan pemutakhiran, bias indikator fisik rumah, dan keterbatasan akses kelurahan dalam memperbaiki data secara final. Faktor utama yang memengaruhi akurasi adalah integrasi sistemik, jeda waktu birokrasi, bias indikator fisik, dan sentralisasi akses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan sinkronisasi, verifikasi lapangan berkala, pemutakhiran responsif, dan indikator kontekstual diperlukan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Akurasi Data, Kemiskinan Ekstrem, P3KE, DTSEN, Kualitas Data

Abstract

This study addresses the problem of social assistance mistargeting caused by discrepancies between extreme poverty data and the actual socioeconomic conditions of communities in Bengkulu City, particularly in Kampung Melayu District. The study aims to analyze the accuracy of P3KE/DTSEN data in supporting extreme poverty alleviation and to identify the factors affecting such accuracy. The research is grounded in Richard Y. Wang and Diane M. Strong's (1996) Data Quality Theory, covering intrinsic, contextual, representational, and accessibility dimensions. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving six informants from the Social Affairs Office, Bappeda, village administration, neighborhood unit leaders, and beneficiary residents. The findings indicate that data accuracy remains

suboptimal, marked by inclusion errors, delayed updating processes, physical-indicator bias, and limited local authority to finalize data corrections. The main influencing factors are systemic integration, bureaucratic time lag, physical-indicator bias, and centralized access. The study concludes that improved synchronization, periodic field verification, responsive updating, and more contextual indicators are essential to enhance the targeting accuracy of extreme poverty alleviation policies.

Keywords: Data Accuracy, Extreme Poverty, P3KE, DTSEN, Data Quality

LATAR BELAKANG

Kemiskinan ekstrem merupakan tantangan pembangunan yang belum tuntas diselesaikan di Indonesia. Berdasarkan standar Purchasing Power Parity (PPP) Bank Dunia sebesar USD 1,90 per kapita per hari, masyarakat dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya berada di bawah kisaran Rp322.170 hingga Rp350.000 per kapita per bulan. Mereka yang berada di bawah garis ini tidak hanya kesulitan mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga kehilangan akses terhadap sanitasi, air bersih, dan fasilitas kesehatan dasar.

Merespons persoalan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan target angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada tahun 2024. Instrumen utama yang digunakan adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang kemudian diintegrasikan ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak tahun 2024, dikelola melalui sistem SIKS-NG. Data ini dirancang memberikan informasi secara by name by address pada tingkat kesejahteraan terendah (desil 1–3) agar program bantuan dapat dieksekusi secara mikro dan tepat sasaran.

Namun dalam implementasinya, validitas dan akurasi data P3KE/DTSEN masih menjadi perdebatan. Dinamika kependudukan yang cepat—kematian, perpindahan penduduk, atau perubahan status ekonomi—membuat data cepat usang apabila tidak melalui tahapan verifikasi dan validasi yang ketat di tingkat daerah. Berbagai penelitian terdahulu menemukan bahwa data P3KE tidak sepenuhnya akurat dan masih terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi lapangan (Pratama et al., 2023; Nurpahdi et al., 2025; Cipta, 2025).

Persoalan akurasi data menjadi sangat krusial di Kota Bengkulu, khususnya di Kecamatan Kampung Melayu yang tercatat memiliki jumlah keluarga miskin ekstrem tertinggi di kota ini berdasarkan data P3KE tahun 2022, yaitu sekitar 718 keluarga dengan status desil 1. Kecamatan ini merupakan kawasan pesisir di mana mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan tangkap tradisional dan buruh pesisir dengan penghasilan sangat fluktuatif, sehingga data kemiskinan yang statis menjadi sangat rentan mengalami bias.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji aspek hilir (evaluasi penyaluran bantuan) tanpa secara mendalam mengeksplorasi aspek hulu, yaitu kualitas data sebagai instrumen penargetan kebijakan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis akurasi data P3KE/DTSEN secara kualitatif menggunakan

Teori Kualitas Data Wang dan Strong (1996) yang mencakup empat dimensi: intrinsik, kontekstual, representasional, dan aksesibilitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai fenomena akurasi data kemiskinan ekstrem di tingkat lokal. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang dipilih secara purposive karena merupakan wilayah dengan jumlah keluarga miskin ekstrem (desil 1) tertinggi di Kota Bengkulu berdasarkan data P3KE tahun 2022.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali informasi dari informan kunci dan informan pokok; (2) observasi partisipatif di lokasi penelitian guna mengamati kondisi faktual masyarakat, proses pendataan, dan penggunaan sistem SIKS-NG; serta (3) dokumentasi berupa pengumpulan dokumen resmi, tangkapan layar aplikasi, dan foto kondisi lapangan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kemiskinan ekstrem.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Peran
1	Budiman Sanjaya, S.Sos	Operator SIKS-NG Dinas Sosial Kota Bengkulu	Informan Kunci
2	Nurhidayati, S.Farm., M.E	Kepala Bidang PPM Bappeda Kota Bengkulu	Informan Kunci
3	Rian Berta	Staff Operator Kelurahan Sumber Jaya	Informan Kunci
4	Syarkowi	Ketua RT Kecamatan Kampung Melayu	Informan Pokok
5	Supami	Warga Penerima Bantuan	Informan Pokok
6	Supinah	Warga Penerima Bantuan	Informan Pokok

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan triangulasi sumber (membandingkan data dari aparatur daerah, aparat pengawasan mikro RT, masyarakat penerima manfaat, dan dokumen resmi). Kerangka analisis mengacu pada Teori Kualitas Data

Richard Y. Wang dan Diane M. Strong (1996) yang membagi kualitas data ke dalam empat kategori konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kampung Melayu merupakan salah satu dari sembilan kecamatan di Kota Bengkulu yang terletak di bagian selatan kota, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Kecamatan ini memiliki luas wilayah daratan sekitar 38,38 km² dan secara administratif menaungi enam kelurahan: Teluk Sepang, Padang Serai, Sumber Jaya, Kandang, Kandang Mas, dan Muara Dua. Jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 51.112 jiwa dengan komposisi 25.867 laki-laki dan 25.245 perempuan.

Sebagai kawasan pesisir, mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan tangkap tradisional, buruh, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal. Kondisi ini menyebabkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat sangat fluktuatif dan bergantung pada musim tangkapan ikan. Berdasarkan data P3KE Kota Bengkulu tahun 2022, kecamatan ini memiliki jumlah keluarga miskin ekstrem (desil 1) tertinggi di Kota Bengkulu, yaitu sekitar 718 keluarga, menjadikannya wilayah prioritas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Akurasi Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Teori Wang & Strong

Kualitas Data Intrinsik

Dimensi intrinsik menyoroti sejauh mana data P3KE/DTSEN mampu merepresentasikan kebenaran objektif. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukannya indikasi inclusion error, yaitu kondisi ketika warga yang secara ekonomi sudah lebih mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan. Hal ini diakui oleh Budiman Sanjaya, S.Sos (Operator SIKS-NG Dinas Sosial): "Sementara ini memang ada beberapa data yang tidak sesuai di lapangan. Karena ada penggabungan data DTSEN, dari data Regsosek, DTKS, dan P3KE sehingga data banyak ketidaksesuaian yang menerima bantuan untuk saat ini." (Wawancara, 13 Mei 2026).

Ketidakakuratan tersebut lebih banyak bersumber dari kelemahan sistemik akibat transisi dan penggabungan berbagai basis data nasional, bukan dari manipulasi di tingkat bawah. Hal ini sejalan dengan Wang dan Strong (1997) bahwa dimensi intrinsik—khususnya akurasi—merupakan fondasi kualitas data. Meskipun demikian, pengawasan mikro oleh RT dan proses verifikasi lapangan sudah cukup membantu mengurangi subjektivitas pendataan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Iskandar et al. (2023) dan Nurpahdi et al. (2025) yang menegaskan bahwa data penerima manfaat yang tidak akurat menjadi hambatan utama implementasi kebijakan kemiskinan ekstrem.

Kualitas Data Kontekstual

Dimensi kontekstual mengkaji relevansi, ketepatan waktu, dan kelengkapan data. Pemutakhiran data secara teknis tersedia dan dapat dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIKS-NG, namun hasilnya tidak langsung terlihat dalam sistem pusat. Bapak Budiman menjelaskan bahwa hasil pemutakhiran paling cepat terlihat dalam tiga bulan, dengan

prasyarat kelengkapan dokumen berupa foto rumah, foto KK, foto KTP, serta data aset, pekerjaan, dan rekening listrik.

Ketua RT Syarkowi memperkuat temuan ini: "Paling lama 3 bulan. Begitu ada laporan warga jatuh miskin karena sakit keras atau kena PHK, saya selaku RT harus buat pengantar dulu ke kelurahan... Proses berjenjang ini yang biasanya memakan waktu." (Wawancara, 24 Mei 2026). Temuan ini selaras dengan Wang dan Strong bahwa data berkualitas kontekstual harus tepat waktu. Kondisi masyarakat pesisir yang sangat fluktuatif menjadikan keterlambatan tiga bulan sebagai kerentanan serius. Hasil ini sejalan dengan temuan Herlinda et al. (2026) dan Lukito et al. (2024) mengenai tantangan operasional pembaruan data kemiskinan.

Kualitas Data Representasional

Dimensi representasional mengkaji apakah indikator kemiskinan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara tepat. Hasil penelitian mengidentifikasi bias indikator fisik, yaitu kecenderungan penilaian kemiskinan yang terlalu menekankan kondisi fisik rumah (atap rumbia, dinding papan, lantai tanah). Budiman Sanjaya mengemukakan: "Potret kemiskinan yang sesungguhnya di kota mungkin terlihat lebih sedikit. Faktanya, rata-rata rumah di kota sudah cukup layak huni, namun banyak warga yang statusnya mengontrak." (Wawancara, 13 Mei 2026).

Warga Supinah mengonfirmasi persoalan ini dari perspektif masyarakat: "Pemerintah sering menilai hanya dari fisik rumah, misalnya kalau rumahnya sudah permanen atau dindingnya semen dianggap mampu. Padahal, bisa jadi rumah itu hasil peninggalan orang tua, sementara kondisi ekonomi di dalamnya sedang jatuh, kerjanya serabutan, dan utangnya banyak." (Wawancara, 24 Mei 2026). Temuan ini sejalan dengan Putri et al. (2022) yang menekankan pentingnya pendekatan multidimensi dalam pemetaan kemiskinan, serta Rizkiyanto et al. (2025) yang menggunakan 16 variabel sosial ekonomi dalam penentuan penerima bantuan.

Kualitas Data Aksesibilitas

Dimensi aksesibilitas mengkaji kemudahan akses dan perlindungan data. Masyarakat dapat mengecek status data melalui kantor kelurahan maupun aplikasi Cek Bansos. Namun, proses perubahan data tidak dapat dilakukan langsung oleh kelurahan. Rian Berta (Operator Kelurahan) menjelaskan: "Tidak bisa langsung, prosesnya berjenjang. Perubahan data diusulkan dari kelurahan, kemudian naik ke Dinas Sosial Kota, baru kemudian ke Pusdatin di tingkat pusat." (Wawancara, 19 Mei 2026).

Observasi di meja kerja operator kelurahan mengonfirmasi bahwa saat operator selesai melakukan pemutakhiran data, sistem mengunci kewenangan kelurahan pada status Pending—menunggu verifikasi dinas sosial dan keputusan BPS RI per tiga bulan. Meskipun sentralisasi akses berguna menjaga keamanan data, kondisi ini membuat proses perbaikan data menjadi lambat. Temuan ini konsisten dengan Cipta (2025) dan Herlinda et al. (2026) mengenai pentingnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan birokrasi berjenjang.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Berdasarkan Dimensi Kualitas Data Wang & Strong

Dimensi	Temuan	Faktor Pemengaruh
Intrinsik	Masih terdapat inclusion error; data lama belum diperbarui akibat transisi DTSEN	Integrasi Sistemik (P3KE, DTKS, Regsosek, DTSEN)
Kontekstual	Pemutakhiran berkala tersedia, namun belum responsif terhadap perubahan mendadak	Jeda Waktu Birokrasi (minimal 3 bulan)
Representasional	Indikator fisik rumah tidak merepresentasikan kemiskinan perkotaan/pesisir secara utuh	Bias Indikator Fisik
Aksesibilitas	Kelurahan hanya berperan sebagai 'pengusul'; keputusan final di BPS/Pusdatin	Sentralisasi Akses

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akurasi Data Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan analisis terhadap empat dimensi kualitas data, penelitian ini mengidentifikasi empat faktor utama yang saling berkaitan dan memengaruhi akurasi data kemiskinan ekstrem di Kecamatan Kampung Melayu:

Pertama, Faktor Integrasi Sistemik. Penggabungan berbagai basis data nasional—P3KE, DTKS, Regsosek, dan DTSEN—dapat menimbulkan perbedaan antara data hasil pemutakhiran kelurahan dengan data yang muncul di tingkat pusat. Data yang sudah diverifikasi di tingkat lokal masih dapat berubah ketika diproses melalui penilaian sistem nasional. Kondisi ini menciptakan gap antara realitas lapangan dan catatan administratif yang digunakan sebagai basis kebijakan.

Kedua, Faktor Jeda Waktu Birokrasi. Proses pemutakhiran data yang berjenjang menyebabkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak langsung tercermin dalam sistem. Kelengkapan dokumen (KTP, KK, foto rumah, data aset, pekerjaan) menjadi prasyarat yang seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat kurang mampu. Bagi masyarakat pesisir yang penghasilannya sangat fluktuatif, keterlambatan tiga bulan atau lebih dapat berarti mereka tidak mendapatkan bantuan tepat waktu saat mengalami guncangan ekonomi.

Ketiga, Faktor Bias Indikator Fisik. Indikator kemiskinan yang terlalu menekankan kondisi fisik rumah belum sepenuhnya mampu memotret kemiskinan masyarakat perkotaan dan pesisir. Rumah yang tampak layak belum tentu menunjukkan keluarga tersebut mampu secara ekonomi—bisa saja rumah tersebut merupakan kontrakan, rumah warisan, atau tempat menumpang, sementara penghasilan pemiliknya tetap tidak menentu. Diperlukan indikator yang lebih kontekstual yang mencakup pekerjaan, penghasilan, status kepemilikan rumah, jumlah tanggungan, dan kerentanan ekonomi.

Keempat, Faktor Sentralisasi Akses. Keterbatasan kewenangan kelurahan dalam mengubah data secara langsung menyebabkan proses perbaikan data menjadi lambat. Operator kelurahan hanya dapat mengusulkan atau memutakhirkan data, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada BPS/Pusdatin di tingkat pusat. Di satu sisi, sentralisasi ini berguna untuk menjaga keamanan data, tetapi di sisi lain membatasi kecepatan respons terhadap perubahan kondisi masyarakat yang bersifat mendesak.

Keempat faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan siklus ketidakakuratan data yang sulit diputus tanpa intervensi sistemik yang komprehensif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa akurasi data kemiskinan ekstrem bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi juga persoalan tata kelola administrasi publik yang memerlukan reformasi dari hulu ke hilir.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akurasi data kemiskinan ekstrem P3KE/DTSEN di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu belum sepenuhnya optimal. Secara intrinsik, masih terdapat inclusion error akibat integrasi berbagai basis data nasional. Secara kontekstual, pemutakhiran data belum responsif terhadap perubahan mendadak karena jeda waktu birokrasi minimal tiga bulan. Secara representasional, indikator fisik rumah belum mampu merepresentasikan kemiskinan perkotaan dan pesisir secara utuh. Secara aksesibilitas, kelurahan hanya berperan sebagai pengusul tanpa kewenangan untuk menetapkan perubahan data secara final.

Empat faktor utama yang memengaruhi akurasi data adalah integrasi sistemik, jeda waktu birokrasi, bias indikator fisik, dan sentralisasi akses. Penelitian ini merekomendasikan: (1) penguatan sinkronisasi antara data hasil verifikasi lapangan dengan sistem nasional; (2) percepatan proses pemutakhiran data dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada operator kelurahan; (3) rekonstruksi indikator kemiskinan yang lebih kontekstual dan multidimensi; serta (4) peningkatan kapasitas SDM dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan basis data kemiskinan. Perbaikan-perbaikan ini diperlukan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si dan Heru Purnawan, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Bengkulu, Bappeda Kota Bengkulu, Kantor Kelurahan Sumber Jaya, dan seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, A., Asmanto, P., Nugroho, D., Nursyahrizal, A.C., & Tohari, A. (2022). Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3ke). Working Paper – Tnp2k.

Ajun, S.A., Canon, S., & Payu, B.R. (2024). Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Provinsi Gorontalo. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ek&Bi), 7(1), 8. Https://Doi.Org/10.37600/Ekbi.V7i1.1319

Cipta, H. (2025). Integrasi Data Kemiskinan Menuju Cilegon Sejahtera. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 9(1), 61–77. Https://Doi.Org/10.56945/Jkpd.V9i1.367

Dewi Rahmawati, F., Khasanah, L., & Laksono, N. (2025). Edukasi Masyarakat Sehat Sejahtera: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 88–92.

Helvanza, M., & Dewi, S.P. (2025). Penguatan Basis Data Kemiskinan Melalui Aplikasi Simnangkis Di Kabupaten Kudus. Jurnal Community Caring, 5(2), 135–145. Https://Doi.Org/10.33701/Cc.V5i2.5279

Iskandar, A.H., Suja'ie, A.F., & Agusta, I. (2023). Redesigning Consolidated Data For Handling Extreme Poverty In Rural Areas Based On Sdgs Desa. Journal Of Community Positive Practices, 23(1), 96–115. Https://Doi.Org/10.35782/Jcpp.2023.1.08

Lukito, C., Septian, E., Najah, L.L., & Muhromi, M.S. (2024). Poverty Data Revolution: Analyzing The Effectiveness Of Damsida Application In Bojonegoro District. Jurnal Iso: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 1–10. Https://Doi.Org/10.53697/Iso.V4i2.1969

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mikraj, A.L., Herlinda, D., Nielwaty, E., & Elsi, M. (2026). Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Al-Mikraj, 6(1), 1708–1722. Https://Doi.Org/10.37680/Almikraj.V6i1.8997

Moleong, L.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Nurpahdi, M., Rustanto, A.E., Wicaksana, H.H., & Cholifihani, M. (2025). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim: Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 584–592.

Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pratama, B.C., Suryahadi, A., & Al Izzati, R. (2023). Evaluasi Akurasi Data Kemiskinan Ekstrem Pada Program P3ke. Jurnal Kebijakan Sosial, 5(2), 33–47.

Putri, S.R., Wijayanto, A.W., & Sakti, A.D. (2022). Developing Relative Spatial Poverty Index Using Integrated Remote Sensing And Geospatial Big Data Approach: A Case Study Of East Java, Indonesia. Isprs International Journal Of Geo-Information, 11(5). Https://Doi.Org/10.3390/Ijgi11050275

Rizkiyanto, M.A., Sabirin, S., & Triyono, G. (2025). Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Bogor Menggunakan Metode Topsis. Jurnal Manajemen Informasi, 12(1), 1–15.

Strong, D.M., Lee, Y.W., & Wang, R.Y. (1997). Data Quality In Context. Communications Of The Acm, 40(5), 103–110. Https://Doi.Org/10.1145/253769.253804

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryahadi, A., & Al Izzati, R. (2022). Dinamika Kemiskinan Ekstrem Dan Kebijakan Penanggulangannya Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 13(1), 1–14.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2021). Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Indonesia. Jakarta: Tnp2k.

Wang, R.Y., & Strong, D.M. (1996). Beyond Accuracy: What Data Quality Means To Data Consumers. Journal Of Management Information Systems, 12(4), 5–33.